

Rencana Strategis Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2025-2029



Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang

Email : bgtnkt@kemendikdasmen.go.id

Laman : bgtnkt.kemendikdasmen.go.id



Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Rencana Strategis (Renstra) Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025–2029 sebagai dokumen perencanaan Balai selaku unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai tugas dan fungsi yang diemban di bidang pengembangan dan pemberdayaan guru, kepala sekolah, calon kepala sekolah, pengawas, calon pengawas, serta tenaga kependidikan lainnya, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru dapat disusun dan diselesaikan.

Rencana Strategis (Renstra) UPT Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan sebuah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah kelembagaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan yang diberlakukan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 pada prinsipnya merupakan bagian dari dukungan terhadap Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru dalam pencapaian Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kurun waktu tahun 2025-2029 dalam bidang Guru dan Tenaga Kependidikan serta diharapkan dapat mendukung pelaksanaan perencanaan berbasis kinerja yang berkualitas.

Penyusunan Renstra Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 disesuaikan dengan pedoman penyusunan Renstra Kelembagaan yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang memuat rumusan kebijakan dan strategi, tujuan, sasaran strategis, serta program dan kegiatan pada tingkat Unit Pelaksana Teknis Balai Guru dan Tenaga Kependidikan sesuai tugas dan fungsi kelembagaan

Terselesainya penyusunan Rencana Strategis BGTK Provinsi Nusa Tenggara Timur 2025-2029 atas berkat dukungan berbagai pihak. Untuk itu disampaikan terima kasih dan penghargaan atas segala budi baik yang diberikan. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) BGTK Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025–2029, tentunya masih belum sempurna sebagaimana yang diharapkan. Dengan demikian masukan dan saran sangat diperlukan guna penyempurnaan dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) BGTK Provinsi Nusa Tenggara Timur 2025–2029.

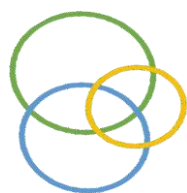
Akhirnya semoga Renstra ini dapat menjadi pedoman bagi semua pihak khususnya jajaran BGTK Provinsi Nusa Tenggara Timur selama periode renstra berjalan dalam mendukung pencapaian dalam bidang pengembangan dan pemberdayaan guru, kepala sekolah, calon kepala sekolah, pengawas sekolah, calon pengawas sekolah serta tenaga kependidikan lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Kupang, 2025

Kepala BGTK Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Dr. Teguh Rahayu Slamet, M.Si
NIP.197104292007011001



Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I Pendahuluan	1
I.1. Kondisi Umum	1
I.2. Potensi dan Permasalahan	11
BAB II Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis	19
II.1. Visi BGTK Provinsi Nusa Tenggara Timur	19
II.2. Misi BGTK Provinsi Nusa Tenggara Timur	19
II.3. Tujuan BGTK Provinsi Nusa Tenggara Timur	20
II.4. Sasaran Strategis BGTK Provinsi Nusa Tenggara Timur	20
Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka	
BAB III Kelembagaan	23
III.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian	23
III.2 Arah Kebijakan dan Strategi Balai	24
III.2. Kerangka Regulasi	25
III.3. Kerangka Kelembagaan	27
II.4. Reformasi Birokrasi	33
BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	35
IV.1. Target Kinerja	35
IV.2. Kerangka Pendanaan	36
BAB V Penutup	38
Lampiran-Lampiran	



BAB I

Pendahuluan

1I.1

Kondisi Umum

Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu UPT (Unit Pelaksana Teknis) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia di bidang Guru dan Tenaga Kependidikan yang melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan guru, kepala sekolah, calon kepala sekolah, pengawas sekolah, calon pengawas sekolah serta tenaga kependidikan lainnya yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru. Dalam mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan strategis kelembagaan melalui serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan dalam pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis (Renstra) UPT Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan sebuah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah kelembagaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan yang diberlakukan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 pada prinsipnya merupakan bagian dari dukungan terhadap Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru dalam pencapaian Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kurun waktu tahun 2025-2029 dalam bidang Guru dan Tenaga Kependidikan serta diharapkan dapat mendukung pelaksanaan perencanaan berbasis kinerja yang berkualitas.

Penyusunan Renstra Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 disesuaikan dengan pedoman penyusunan Renstra Kelembagaan yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang memuat rumusan kebijakan dan strategi, tujuan, sasaran strategis, serta program dan kegiatan pada tingkat Unit Pelaksana Teknis Balai Guru dan Tenaga Kependidikan sesuai tugas dan fungsi kelembagaan. Dalam Renstra sebelumnya tahun 2020-2024 Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah UPT Kemdikbudristek berkedudukan dibawah Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan dengan

nama Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Nusa Tenggara Timur, terkait restrukturisasi kelembagaan balai pada Kemdikbudristek memasuki pertengahan tahun 2022-2024. Selama tahun 2022-2024 BGP Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran kegiatan dan target dari (1) Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran dengan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan (2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen GTK.

Sasaran Program	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Lini Dasar	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan								
1.1	Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan pembelajaran paradigma baru	Orang		0	0	1.926	2.568	5.136	
1.2	Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran dalam peningkatan kompetensinya	Orang		0	0	9.534	9.534	9.534	
1.3	Jumlah guru yang mengikuti program pendidikan kepemimpinan sekolah model baru	Orang		0	0	636	796	796	
2	Meningkatnya tata kelola BGP Provinsi Nusa Tenggara Timur								
2.1	Predikat SAKIP BGP Provinsi Nusa Tenggara Timur	Predikat		-	-	-	BB	A	
2.2	Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L BGP Provinsi Nusa Tenggara Timur	Nilai		0	0	80	90	90	

Sumber : Renstra BGP Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2020-2024

Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran dengan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memiliki sasaran kegiatan meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja kegiatan yakni (1) Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan pembelajaran paradigma baru; (2) Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran dalam

peningkatan kompetensinya, (3) Jumlah guru yang mengikuti program pendidikan kepemimpinan sekolah model baru.

a. Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan melalui Pelatihan Pembelajaran Paradigma Baru

Guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan pembelajaran paradigma baru dalam bentuk intervensi Program Sekolah Penggerak (PSP) yang merupakan program peningkatan kualitas pendidikan di sekolah dengan intervensi menyeluruh baik kepada Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Guru yang merupakan penyempurnaan program transformasi pada tingkat sekolah. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran intrakurikuler yang terdiferensiasi dimana konten akan lebih optimal sehingga siswa memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat siswa. Proyek kokurikuler dilakukan lintas mata pelajaran yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum.

Dalam program ini, guru dan tenaga kependidikan yang bernaung pada sekolah penggerak mendapatkan pelatihan dari pelatih ahli/fasilitator, baik dalam bentuk luring maupun daring untuk berbagai bentuk kegiatan coaching, pelatihan, refleksi, kunjungan lapangan, dan lokakarya untuk sekolah penggerak yang ada di 22 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekolah Penggerak Angkatan I sebanyak 94 Satuan, sedangkan Sekolah Penggerak Angkatan II sebanyak 187 Satuan dan Sekolah Penggerak Angkatan III sebanyak 76 Satuan.

Tabel 1.1 Jumlah Angkatan Sekolah Penggerak perkabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Sampai dengan Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Jml SP Angk. 1	Jml SP Angk. 2	Jml SP Angk. 2	Total
1	Kab. Sumba Barat Daya			3	3
2	Kab. Sumba Barat			3	3
3	Kab. Sumba Tengah	9	5	2	16
4	Kab. Sumba Timur	18	13	2	33
5	Kab. Sabu Raijua			1	1
6	Kab. Rote Ndao	14	12	1	27
7	Kota Kupang	18	17	2	37
8	Kab. Kupang			1	1
9	Kab. Timor Tengah Selatan			4	4
10	Kab. Malaka		6		6
11	Kab. Timor Tengah Utara		10	6	16
12	Kab. Belu			3	3
13	Kab. Alor		29	3	32
14	Kab. Lembata			2	2
15	Kab. Flores Timur			9	9
16	Kab. Sikka		29	3	32
17	Kab. Ende		27	2	29
18	Kab. Nagekeo			18	18
19	Kab. Ngada		18	3	21
20	Kab. Manggarai Timur	35	21		56
21	Kab. Manggarai			4	4
22	Kab. Manggarai Barat			4	4
	Total Sekolah Penggerak	94	187	76	357

Sumber : Lakin BGP Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2024

Selain itu terdapat pula program kegiatan inovatif yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan pemenuhan Indikator kinerja kegiatan Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan pembelajaran paradigma baru. Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan melalui pelatihan pembelajaran paradigma baru adalah proses pelatihan untuk guru dan tenaga kependidikan agar mampu mengadaptasi metode pengajaran yang berfokus pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter peserta didik sesuai nilai-nilai Pancasila. Pelatihan ini menekankan perubahan paradigma dari mengajar menjadi memfasilitasi dan menginspirasi, termasuk menguasai teknologi, merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa, serta membentuk sikap profesional yang tanggap terhadap perubahan.

b. *Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan melalui Inovasi Pembelajaran*

Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran dilakukan dengan berbagai cara seperti pelatihan, pendampingan, mentoring, coaching, ataupun penguatan/pendampingan komunitas belajar. Komunitas belajar adalah salah satu strategi untuk meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Peranan Komunitas Belajar dalam implementasi Kurikulum Merdeka, sangat urgensial dalam mendukung guru, tenaga kependidikan dan pendidik lainnya untuk dapat mendiskusikan dan menyelesaikan berbagai masalah pembelajaran yang dihadapi saat implementasi Kurikulum Merdeka.

Selain itu salah satu bentuk inovasi dalam pembelajaran adalah dengan memanfaatkan platform teknologi yang bertujuan membantu pendidik dalam mengimplementasikan pembelajaran mandiri yang bisa disesuaikan dengan kondisi waktu dan tempat dalam mengembangkan kompetensinya dan mendorong pendidik saling belajar dalam ruang kolaborasi dan komunitas belajar (*Learning Community*) dengan guru yang lain dalam hal berbagi pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan (*Social Constructivism*). Pemanfaatan PMM di Provinsi Nusa Tenggara Timur terus meningkat hingga tahun 2024 sebagai sarana edukasi digital yang memiliki tiga fitur utama: Belajar, Mengajar, dan Berkarya guna pengimplementasian Kurikulum Merdeka.



Sumber : Lakin BGP Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2024

Gambar 1.1 Jumlah Guru Pengguna PPM Kategori Baik di Provinsi Nusa Tenggara Timur Sampai dengan Tahun 2024

Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mengoptimalkan potensi unik setiap siswa melalui beberapa pendekatan utama: pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran berbasis proyek, asesmen yang menyeluruh, dan pengembangan karakter melalui Profil Pelajar Pancasila. Sekolah dapat memilih implementasi secara mandiri (Merdeka Belajar, Merdeka Berubah, atau

Merdeka Berbagi) sesuai kesiapan mereka dan dapat memanfaatkan Platform Merdeka Mengajar (PMM) untuk panduan dan sumber daya.

c. ***Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan melalui program pendidikan kepemimpinan sekolah model baru***

Dalam kaitannya dengan peningkatan kompetensi guru melalui program pendidikan kepemimpinan sekolah model baru diimplementasikan melalui program Pendidikan Guru Penggerak (PGP) yang merupakan program pendidikan kepemimpinan sekolah model baru dalam bentuk program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang mampu mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif maupun berperan dalam pengembangan pendidik lainnya guna mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil Pelajar Pancasila.

Program ini meliputi pelatihan daring, lokakarya, konferensi, dan pendampingan selama 6 bulan, di mana guru tetap menjalankan tugas mengajarnya seperti biasa. Tujuannya adalah meningkatkan kompetensi guru dan menjadi pendorong bagi komunitas belajar di sekolah dan di wilayahnya agar menjadi guru penggerak/pendamping bagi rekan pengajar lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah. Secara keseluruhan hingga tahun 2024 guru yang terlibat dalam program PGP Reguler Angkatan I hingga Angkatan 11 dan PGP Dasus Angkatan 9 dan 11 sebanyak 3.515 orang pada 22 Kab/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sudah ditetapkan sebagai guru penggerak di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

No	Angkatan PPGP	Jumlah Kelulusan Peserta
1	PPGP Angkatan 9 Reguler	1.170
2	PPGP Angkatan 9 Dasus	24
3	PPGP Angkatan 10 Reguler	1.034
4	PPGP Angkatan 10 Rekognisi	39
5	PPGP Angkatan 11 Reguler	1.172
6	PPGP Angkatan 11 Rekognisi	50
7	PPGP Angkatan 11 Dasus	26
	Total Peserta	3.515 peserta

Sumber : Lakin BGP Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2024

Gambar 1.2 Jumlah Guru Peserta Program Sekolah Penggerak di Provinsi Nusa Tenggara Timur Hingga Tahun 2024

Selama program Pendidikan Guru Penggerak (PGP), guru tetap menjalankan tugas mengajarnya sebagai guru. Materi yang dipelajari guru terdiri dari modul paradigma

dan visi Guru Penggerak, praktik pembelajaran yang berpihak pada murid, pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah dan selebrasi, refleksi. Disisi lain Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen GTK di balai diimplementasikan untuk mencapai sasaran meningkatnya Tata Kelola BGP Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan 2 (dua) Indikator Kinerja kegiatan yakni (1) Predikat SAKIP BGP Provinsi Nusa Tenggara Timur ditetapkan peringkat; (2) Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-KL BGP Provinsi Nusa Tenggara Timur

a. Peringkat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

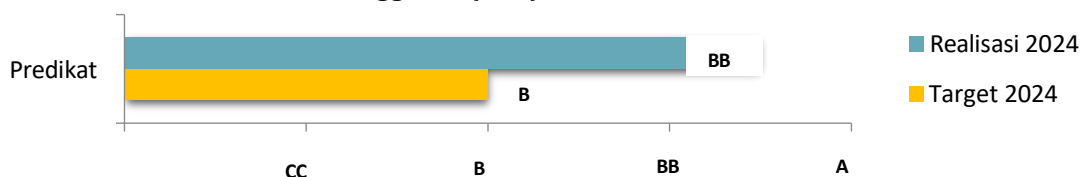
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Permendikbudristek Nomor 40 tahun 2022 tentang SAKIP menegaskan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah meliputi rencana strategis; perjanjian kinerja; pengukuran kinerja; pengelolaan data kinerja; pelaporan kinerja; dan reviu laporan kinerja.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Pengimplementasian SAKIP bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi kinerja instansi pemerintah melalui penyusunan rencana strategis, pengukuran, serta pelaporan kinerja yang terukur dan transparan demi terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik.

Dalam implementasi SAKIP kegiatan yang dilaksanakan oleh BGP Provinsi Nusa Tenggara Timur hingga tahun 2024 telah menunjukkan progres yang baik dengan nilai penilaian SAKIP yang meningkat selama tahun 2023 hingga 2024. Kondisi pencapaian ini tentunya masih perlu untuk dioptimalkan pada pengimplementasian Renstra balai tahun 2025-2029.

1. Trend Capaian Kinerja dan Realisasi

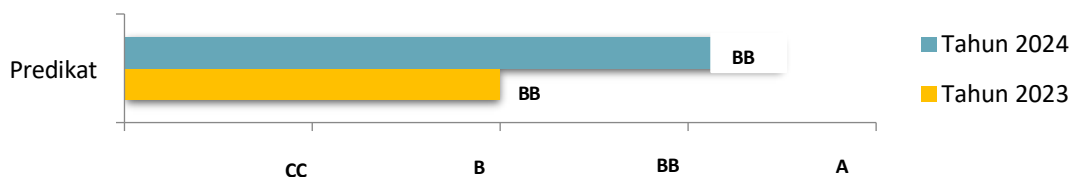
Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024 dari Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 2.1 Predikat SAKIP Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi NTT



Sumber : Lakin BGP Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2024

Berdasarkan grafik di atas, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 2.1 Predikat SAKIP BGP Provinsi NTT mempunyai target BB. Capaian kinerja BGP Provinsi NTT adalah BB. Capaian kinerja predikat SAKIP BGP Provinsi NTT mencapai target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2023 dan 2024 dari Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 2.1 Predikat SAKIP Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi NTT



Sumber : Lakin BGP Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2024

Berdasarkan grafik diatas, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 2.1 Predikat SAKIP Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi NTT mengalami trend kenaikan. Nilai SAKIP BGP Provinsi NTT tahun 2023 mendapatkan nilai BB (73). Sedangkan untuk tahun 2024, BGP Provinsi NTT mendapatkan nilai 75.25 atau predikat BB.

Perbandingan Nilai SAKIP BGP Provinsi NTT tahun 2020-2024 dengan Target Akhir Renstra

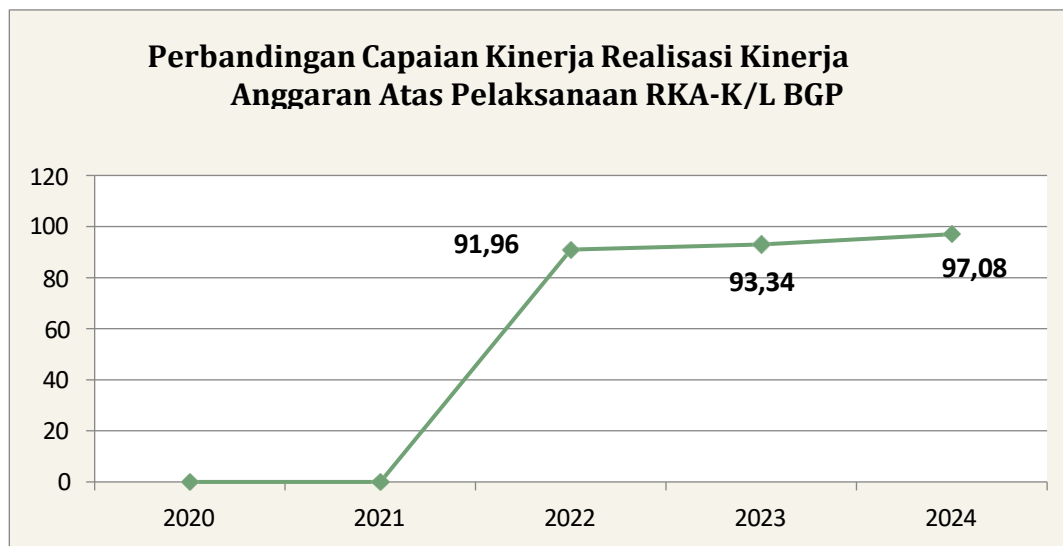
2020		2021		2022			2023			2024			Target Renstra 2020-2024	Total Realisasi 2020-2024	Persentase Ketercapaian 2020-2024
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%			
0	0	0	0	0	0	0	BB	B	87,50	A	BB	87,50	A	BB	87,50

Berdasarkan tabel di atas, realisasi capaian kinerja predikat SAKIP BGP Provinsi NTT tahun 2020 s.d 2022 masih belum ada karena BGP Provinsi NTT baru berdiri bulan Maret 2022 pada semester II (dua). Predikat SAKIP BGP Provinsi NTT tahun 2023 ditargetkan BB dan hasil SAKIP BGP Provinsi NTT berada dikategori BB. Target predikat SAKIP untuk tahun 2024 di renstra kategori A dengan targer renstra akhir A. Nilai predikat SAKIP BGP Provinsi NTT tahun 2024 BB. Jadi meskipun tahun 2024, predikat SAKIP BGP Provinsi NTT sudah melebihi target di perjanjian kinerja 2024, tetapi masih belum bisa memenuhi target renstra tahun 2020-2024. Kedepannya BGP Provinsi NTT masih perlu memperbaiki komponen penilaian SAKIP agar sesuai dengan target renstra.

Dalam implementasi SAKIP BGP Provinsi Nusa Tenggara Timur dilaksanakan melalui pelaksanaan kegiatan, antara lain : Penyiapan dan penyelesaian Lakin Balai Tahun 2023 dan 2024, penyiapan format dan pengumpulan data evaluasi bulanan, Penyiapan dan Penyelesaian Perjanjian Kinerja maupun Rencana Aksi, Reviuw dan penyiapan Renstra Balai/Rencana Kinerja Tahunan serta evaluasi kinerja bulanan dan kinerja triwulanan. serta sosialisasi Perjanjian Kinerja bagi staf balai, maupun penyiapan bahan-bahan pendukung yang dibutuhkan terkait dengan evaluasi akuntabilitas secara mandiri pada tingkat Balai dan Pelaksanaan Evaluasi Mandiri SAKIP pada tingkat Balai, serta mendorong kinerja Tim kerja balai agar secara dinamis dan masif dalam implementasi kegiatan sehingga dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan waktu yang ditentukan dan melaksanakan optimalisasi SDM balai yang tersedia maupun melakukan kolaborasi dengan pihak terkait lainnya.

b. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Pelaksanaan RKA-KL

Kinerja Anggaran merupakan capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga. Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Nilai Kinerja anggaran BGP Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022 hingga tahun 2024 mengalami fluktuasi dalam pencapaiannya.



Sumber : Lakin BGP Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2024

Strategi pencapaian nilai kinerja anggaran hingga tahun 2024 guna memenuhi target yang ditentukan dilakukan dengan strategi pelaksanaan antara lain : (1) monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kegiatan secara berkala guna optimalisasi pencapaian kinerja balai, (2) Pelaksanaan kegiatan sesuai anggaran tersedia untuk mendukung pencapaian indikator Kinerja Kegiatan (IKK) guna akselerasi penyerapan anggaran/kegiatan balai, (3) Penataan dalam Implementasi kegiatan balai sesuai prioritas kegiatan yang dilakukan secara terpadu, komprehensif dan berkelanjutan, (4) evaluasi tingkat balai secara berkala dan reguler perbulan maupun triwulan dalam kaitannya dengan upaya pencapaian realisasi anggran/daya serap.sehingga menunjang ketercapaian output kegiatan.

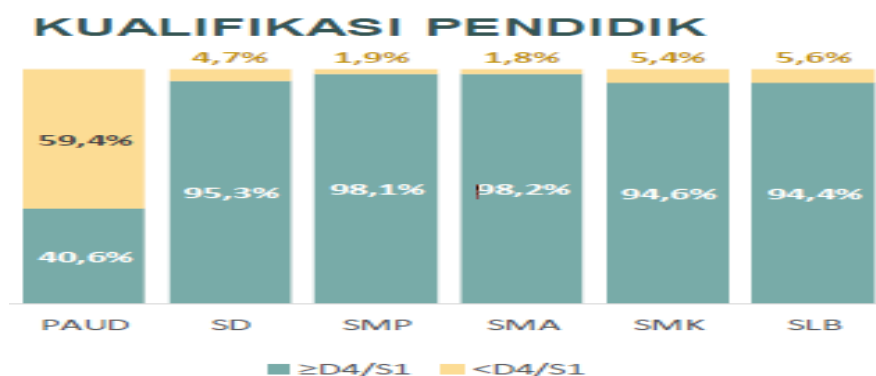
Dalam Renstra Balai Guru dan tenaga Kependidikan 2025-2029 masih terkait dengan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Hal ini sejalan dengan regulasi kelembagan balai berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan.

1.1.2 Potensi dan Permasalahan

UPT BGTK Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan guru, kepala sekolah, calon kepala sekolah, pengawas sekolah, calon pengawas sekolah serta tenaga kependidikan lainnya. Terkait dengan hal ini maka dalam renstra BGTK Provinsi Nusa Tenggara Timur 2025-2029 akan mengetengahkan analisa permasalahan dan tantangan serta potensi dalam pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan yang perlu mendapat perhatian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, khususnya yang terkait dengan peningkatan tata kelola guru dan tenaga kependidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, antara lain:

1. Peningkatan Kualitas guru

Peningkatan sumberdaya guru di Nusa Tenggara Timur merupakan hal yang sangat penting. Rendahnya mutu pendidikan tak lain disebabkan oleh kurangnya sumberdaya dan mutu guru. Peningkatkan kualitas guru dapat dilakukan melalui pengembangan pendidikan dan berbagai kegiatan pelatihan. Pengembangan sumber daya guru dalam pelatihan, workshop, seminar, training perlu dilakuan agar guru dapat maksimal dalam menguasai tugasnya, karena faktor pendidikan dan keterampilan guru yang belum maksimal, akan memperburuk eksistensinya dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diembannya. Data Neraca Pendidikan Daerah tahun 2023 jumlah guru/pendidik di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 118.112 orang terdiri dari guru pada jenjang PAUD sebanyak 11.468 orang (9,71%), SD sebanyak 50.659 orang (42,89%), SMP sebanyak 29.462 orang (24,94%), SMA sebanyak 16.700 orang (14,14%), SMK sebanyak 9.103 orang (7,71%), dan SLB sebanyak 720 orang (0,61%). Kualifikasi guru menurut jenjang pendidikan D4/S1 menunjukkan bahwa pada jenjang SMA, SMK dan SMP telah memiliki kualifikasi D3/S1 keatas terutama pada jenjang SD, SMA, SMP, SMK dan SLB telah mencapai > 90% . Data kualifikasi guru dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Sumber : Data Neraca Pendidikan Daerah, Pusdatin, 2023

Gambar.1.3. Guru Menurut Kualifikasi Pendidikan pada setiap Jenjang di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Hasil Uji kompetensi Guru (UKG) tahun 2021 menunjukkan bahwa rata-rata nasional hasil UKG Provinsi Nusa Tenggara Timur hanya 50,34 masih berada di bawah nilai standar nasional 55. Rata-rata capaian ini meliputi semua kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur dengan hasil UKG berada pada rata-rata nilai 48-51. Jika dibandingkan dengan beberapa provinsi lainnya terutama di Indonesia Timur, maka hasil UKG Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dicapai masih belum maksimal. Data hasil UKG beberapa provinsi di Indonesia Timur tahun 2021 yang dapat dibandingkan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur tertera pada Tabel berikut ini.

Tabel 1.2 Hasil UKG Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Lima Provinsi di Indonesia Timur Tahun 2021

Provinsi	SD	SMP	SMA	SMK	Pedago- gik	Profe- sional	Rata- rata
Maluku	45,40	47,96	50,79	50,24	46,23	47,88	47,38
Papua	46,19	50,07	53,76	52,04	47,34	49,84	49,09
Papua Barat	46,66	50,88	53,21	52,16	47,73	50,21	49,47
Maluku Utara	42,76	45,49	48,38	48,33	43,49	45,34	44,79
NTT	48,68	50,86	54,30	52,39	48,27	51,24	50,34
Sulawesi Selatan	50,05	54,41	57,75	54,43	49,56	53,83	52,55

Sumber : Neraca Pendidikan Daerah, Kemdikbud 2021 (diolah)

Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya-upaya berkaitan dengan peningkatan kualitas guru di Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu dilakukan pembenahan dari waktu ke waktu secara berkelanjutan dalam tanggungjawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah lewat instansi terkait terutama dalam peningkatan kompetensi para guru. Keberadaan guru dalam melaksanakan tugasnya harus dapat memenuhi standar kompetensi yang mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.

Peningkatan kompetensi guru akan sangat berpengaruh pada peningkatan **kualitas pengajaran dan pembelajaran** yang dirasakan belum optimal karena tidak berdampak terhadap hasil belajar dan karakteristik peserta didik. Hal tersebut terjadi karena: a) masih rendahnya inovasi guru dalam penerapan kurikulum; b) masih rendahnya kemampuan guru dalam memahami karakteristik peserta didik; c) masih rendahnya kemampuan guru dalam memilih pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik; dan d) masih rendahnya peran pendidik dalam penilaian hasil belajar siswa terutama dalam penilaian pembelajaran di kelas.

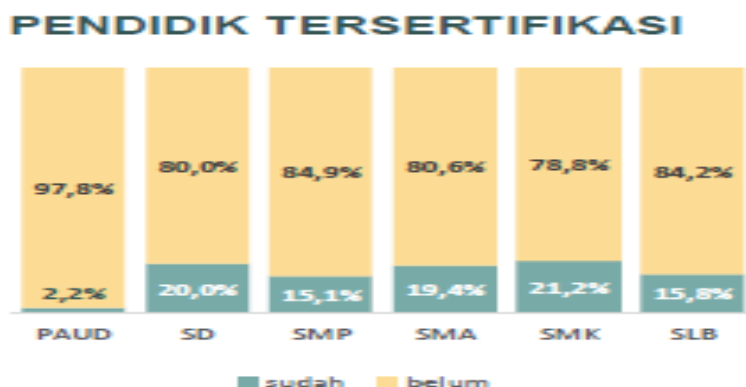
Dari sisi capaian hasil belajar, disparitas mutu pendidikan terlihat dari hasil penilaian Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI) yang mengukur kemampuan matematika, membaca, dan sains siswa Indonesia. Data AKSI SMP pada 2019 memperlihatkan perbedaan

rata-rata skor AKSI siswa dari DKI Jakarta dan DI Yogyakarta dengan daerah lain baik di pulau Jawa maupun daerah lainnya di Indonesia. Pengelompokan nilai AKSI dilakukan berdasarkan pulau-pulau dan dua provinsi dengan nilai tertinggi (DKI Jakarta dan DI Yogyakarta) yang menunjukkan ketimpangan kualitas pendidikan secara geografis. Pulau-pulau di timur Indonesia seperti Sulawesi, Papua, Kepulauan Maluku, dan Kepulauan Nusa Tenggara menunjukkan kesenjangan yang tinggi dibandingkan dengan DKI Jakarta dan DI Yogyakarta dalam nilai AKSI (Pusat Penilaian Pendidikan, 2019).

2. Pengembangan keprofesian guru

UU No 14/2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan guru sebagai agen pembelajaran (*learning agent*) yang harus menjadi fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik. Keberhasilan program pendidikan melalui proses belajar-mengajar sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satu di antaranya adalah tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang memadai, kompeten dan profesional. Pendidik dan tenaga kependidikan merupakan salah satu sumber daya yang penting dan utama dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah, untuk itu perlu dilakukan peningkatan dalam pemberdayaan dan pengembangan keprofesian secara berkelanjutan agar tujuan sekolah dapat tercapai secara maksimal

Guru sebagai tenaga profesional diharapkan terus meningkatkan martabat dan perannya sebagai agen pembelajaran dan pada gilirannya dapat meningkatkan mutu pendidikan nasional. Guru harus memenuhi standar profesional atau kelayakan seorang guru dalam Kegiatan Belajar Mengajar di sekolah. Guru profesional dapat ditandai dengan sertifikasi yang dapat diperolehnya. Hingga tahun 2023 guru yang tersertifikasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih dirasakan belum memadai. Dari jumlah guru sebanyak 118.112 orang guru, tercatat jumlah guru tersertifikasi paling banyak adalah pada pada jenjang SMK sebanyak 21,2 % dan terkecil pada guru PAUD yang masih 2,2 %.



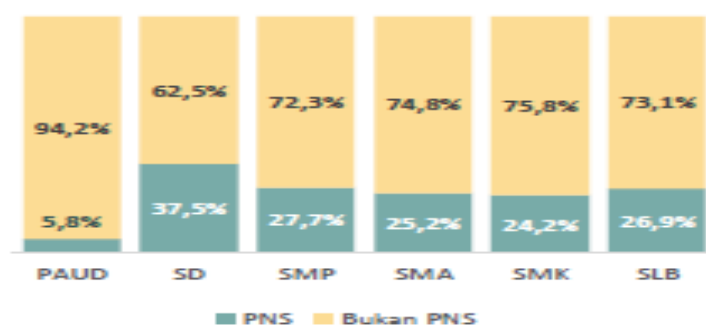
Sumber : Data Neraca Pendidikan Daerah, Pusdatin 2023

Gambar.1.4. Kondisi Guru Tersertifikasi pada setiap Jenjang di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Upaya peningkatan keprofesian guru selain guru harus tersertifikasi maka peningkatan mutu guru yang dilakukan secara masif dan searah masih kurang efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Peningkatan mutu guru dapat dilakukan melalui proses belajar bersama rekan sejawat (*peer learning*) secara terus menerus perlu dilakukan dan dapat dioptimalkan melalui ekosistem belajar guru. Namun kondisi saat ini, ekosistem belajar guru juga belum optimal dikarenakan beberapa hal antara lain: a) belum adanya pemimpin pembelajaran yang terbentuk dan mampu menggerakkan ekosistem belajar guru, b) belum tersedianya intervensi program pemberdayaan ekosistem belajar guru yang berkesinambungan; c) belum tersebarannya ekosistem belajar guru di setiap propinsi termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian pengembangan ekosistem belajar guru harus dapat digerakan melalui pengembangan program kegiatan yang relevan dan berkelanjutan.

3. Pengelolaan, pemenuhan, dan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan

Rendahnya kompetensi guru dapat disebabkan oleh dua hal. Pertama, proses rekrutmen guru tidak dilakukan dengan baik sehingga tidak mampu menghasilkan mutu input guru yang memadai. Rekrutmen guru yang berkualitas terkendala baik dari sisi kelembagaan, seperti aturan dan kewenangan antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, tersandera oleh kepentingan ekonomi politik baik di tingkat nasional maupun daerah, serta dinamika sosial di mana prestise guru PNS dianggap memiliki jaminan kesejahteraan sehingga banyak calon guru mengabdikan sebagai guru honorer dengan keyakinan akan diangkat sebagai PNS. Kedua, pengembangan kompetensi guru dalam jabatan tidak dilakukan secara berkelanjutan.



Sumber : Neraca Pendidikan Daerah, Kemdikbud 2023

Gambar.1.5. Kondisi Status Guru Sesuai Jenjang di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Data di atas menunjukkan status guru di Provinsi Nusa Tenggara Timur hingga tahun 2023 hampir sebagian besar bukan sebagai PNS yang tergolong sebagai tenaga honorer dan dapat dijumpai pada semua jenjang pendidikan dari PAUD, SD hingga SMA/SMK/SLB. Dari jumlah guru sebanyak 118.112 orang, guru pada jenjang pendidikan SD dengan jumlah guru PNS terbanyak sebagai PNS yakni 37,5% dan terkecil pada jenjang pendidikan PAUD sebesar 5,8%, sedangkan guru non PNS terbanyak pada jenjang PAUD 94,2% dan SMK sebanyak 75,8% . Kondisi ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap kinerja guru

terkait dengan tingkat kesejahteraan yang harus dimiliki oleh setiap guru dan tentunya akan menjadi beban tersendiri dalam tata kelola guru di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tabel 1.2 Rasio Pendidik/Guru dan Siswa pada setiap Jenjang Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Hingga Tahun 2023

PENDIDIK : PESERTA DIDIK

SD	SMP	SMA	SMK	SLB
1 : 13	1 : 11	1 : 12	1 : 11	1 : 4

PENDIDIK PNS : PESERTA DIDIK

SD	SMP	SMA	SMK	SLB
1 : 35	1 : 39	1 : 49	1 : 47	1 : 16

Sumber : Neraca Pendidikan Daerah, Pusdatin 2023

Data rasio guru dan siswa terkait dengan aktifitas belajar sesuai data Neraca pendidikan daerah, Pusdatin tahun 2023 di Provinsi Nusa Tenggara Timur tercatat sudah cukup baik dengan jumlah pendidik guru yang ada, namun sebaiknya rasio peserta didik dengan pendidik/guru berstatus PNS maka sesuai pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru menyebutkan bahwa pada jenjang SD, SMP, dan SMA idealnya satu guru bertanggung jawab terhadap 20 murid. Sedangkan, pada jenjang SMK idealnya satu guru bertanggung jawab pada 15 murid, sehingga kesesuaian rasio pendidik/guru hanya pada jenjang SLB.

Disisi lain kondisi tenaga kependidikan yang ada di Nusa Tenggara Timur dengan satuan pendidikan sebanyak 13.345 satuan sebanyak 12.666 orang tenaga kependidikan (Tendik). Adapun jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada setiap satuan pendidikan terdiri atas: a.kepala sekolah; b. pengawas sekolah; dan c. tenaga penunjang lainnya.

Tabel 1.3 Jumlah Satuan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Hingga Tahun 2023

Satuan Pendidikan 13.345		Tendik 12.666	
PAUD	5.287	PAUD	974
SD	5.225	SD	5.016
SMP	1.833	SMP	3.575
SMA	611	SMA	1.979
SMK	343	SMK	941
SLB	46	SLB	181

Sumber : Neraca Pendidikan Daerah, Pusdatin, 2023

Dalam kaitannya dengan peningkatan mutu pendidikan maka tata kelola guru masih harus menjadi fokus perhatian diantaranya terait dengan status guru yang PNS dan Non PNS pada setiap satuan pendidikan maupun komptensinya serta distribusinya yang harus merata pada semua daerah Kabupaten/Kota pada setiap jenjang, sehingga tidak kedapatan tertumpuk pada suatu satuan pendidikan dan kekurangan pada satuan pendidikan lainnya.

Selain itu keberadaan guru juga masih belum merata terutama di daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T) dimana Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu Provinsi yang terdapat daerah 3T. Kemendikbudristek memiliki komitmen untuk mengisi kekurangan guru bermutu di daerah 3T dan guru bukan PNS. Namun komitmen tersebut perlu dibarengi dengan upaya Pemerintah Daerah untuk memastikan SDM guru bermutu sudah ditempatkan dan dimanfaatkan dengan baik supaya menjangkau semakin banyak siswa di setiap daerah kabupaten/kota.

4. Kondisi Geografis Kepulauan

Selain permasalahan terkait keberadaan guru dan tenaga kependidikan di Nusa Tenggara Timur dalam pengembangan tugas pokok dan fungsi balai maka ada beberapa tantangan yang dihadapi yakni Kondisi geografis Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah kerja BGTK Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah darat dan laut yang meliputi pulau-pulau besar dan kecil yang secara keseluruhan Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki wilayah seluas 46.446,64 km². Sebagian besar wilayahnya merupakan perairan seluas 159.146,355 km², sedangkan luas wilayah daratan hanya sekitar 47.931,54 km². Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah Kepulauan dengan jumlah pulau besar dan kecil sebanyak 609 pulau dengan panjang garis pantai 5.700 km (RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025). Hal ini tentunya menimbulkan dinamika pelayanan yang cukup tinggi karena membutuhkan sarana dan prasarana pendukung yang memadai terutama sarana komunikasi dan transportasi yang menimbulkan dampak tingginya biaya pelayanan yang harus dilakukan oleh Balai maupun Dinas/instansi pendidikan kabupaten/kota maupun jangkauan terhadap satuan-satuan Pendidikan dimana guru dan tenaga pendidik berada.

Berbagai permasalahan pendidikan dan tata kelola guru yang kompleks tersebut di atas, terdapat beberapa potensi yang secara internal dan eksternal dapat digunakan untuk membantu penyelesaian permasalahan guru dan tenaga kependidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah kerja UPT BGTK Provinsi Nusa Tenggara Timur, antara lain:

1. Transformasi Teknologi dan Komunikasi

Revolusi industri 4.0 yang dipicu oleh kemajuan teknologi dan komunikasi sekaligus merupakan peluang dan ancaman bagi pembangunan pendidikan, terutama akan memicu penggunaan teknologi dalam pembelajaran seperti pembelajaran dengan multimedia dan alternatif pembelajaran non tatap muka dan pengelolaan pendidikan. Revolusi industri 4.0 dapat berdampak positif dan dapat pula berdampak negatif bagi perkembangan pendidikan. Kemajuan teknologi dan komunikasi di era industri 4.0 telah memberikan alternatif bagi penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Pengembangan Iptek yang demikian pesat harus memicu pendidikan untuk dapat memanfaatkan peluang guna meningkatkan

pelayanan pendidikan maupun meningkatkan mutu guru yang akan berdampak pada mutu pendidikan. Para guru dan tenaga kependidikan maupun para siswa dipaksakan untuk meningkatkan kemampuan terhadap penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Tren peningkatan kemajuan teknologi ini akan semakin meningkat dan tidak akan terbendung. Pemanfaatan teknologi untuk pengayaan terhadap penguasaan materi pembelajaran dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan akan terus berkembang dan menjadi pilihan yang tak dapat dihindarkan.

2. Reformasi Birokrasi

Masih lemahnya manajemen pendidikan pada tingkat pusat, daerah dan sekolah formal sebagai akibat lemahnya sistem pengelolaan, sumberdaya pengelolaan dan sarana prasarana penunjang pengelolaan. Kondisi ini mengakibatkan buruknya ketersediaan data dan merupakan hambatan dalam kelancaran arus informasi untuk pengambilan keputusan. Akurasi, kekinian, relevansi dan kelengkapan data pendidikan masih merupakan persoalan yang memerlukan penanganan yang serius. Dalam pada itu ketersediaan data yang sudah ada belum sepenuhnya digunakan dalam analisis-analisis yang mendorong penyempurnaan tata kelola sistem pendidikan. Sekalipun birokrasi dibentuk dengan tujuan untuk melancarkan roda pengelolaan namun pada praktiknya birokrasi sering menjadikan rantai proses pengelolaan yang panjang dan berbelit-belit yang pada akhirnya akan merugikan banyak pihak pemangku kepentingan. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya reformasi secara menyeluruh terutama terkait dengan keberadaan BGTK Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban dengan penguatan SDM, peningkatan disiplin dan budaya kerja dan pengembangan manajemen secara terpadu dan berkelanjutan dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan maupun aspek-aspek pengawasan secara internal serta pengembangan jaringan kerjasama/kemitraan dengan pihak terkait lainnya. Dengan adanya reformasi birokrasi diharapkan tatakelola menjadi fleksibel dan efisien, transparan dan akuntabel serta terjaminnya layanan bagi masyarakat.

3. Implementasi Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah dimaksudkan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya pendidikan secara efektif serta memberikan kesempatan bagi warga daerah untuk berpartisipasi di dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan daerah. Dengan diterapkannya otonomi daerah, diharapkan kualitas dan daya saing pendidikan di daerah akan meningkat dan berdampak pada tercapainya visi dan misi pendidikan secara keseluruhan. Penyelenggaraan pendidikan menjadi lebih efisien dan

kewajiban pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan daerah menjadi lebih ringan sebab kewajiban tersebut sudah dilimpahkan pada pemerintah daerah. Kebijakan pemerintah daerah melalui otonomiasi diharapkan dapat memberikan dukungan bagi pengembangan mutu guru dan tenaga kependidikan dan sarana pemabngunan pendidikan secara menyeluruh.

Selain potensi tersebut di atas maka terdapat pula beberapa kebijakan pendidikan sebagai potensi yang dapat digunakan untuk membantu penyelesaian permasalahan guru dan tenaga kependidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah kerja UPT BGTK Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terdapat 5 (lima) potensi yang telah diidentifikasi, yaitu: 1) Penerapan model dan inovasi pembelajaran pada semua jenjang satuan pendidikan yang dilakukan secara bertahap; 2) Penguatan pendidikan melalui perencanaan berbasis data yang dimulai pada tingkat satuan pendidikan hingga instansi terkait di tingkat kabupaten dan provinsi untuk peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, 3) Peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan melalui pengembangan profesi dan pelatihan-pelatihan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. 4) Keberadaan MKKS, MGMP dan KKG dapat memberikan pendampingan untuk perbaikan mengajar guru, 5) Pengembangan Rumah Pendidikan sebagai platform terintegrasi yang memfasilitasi kolaborasi berbagai pihak di bidang pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menjadi wadah untuk mengakses berbagai layanan dan sumber daya pendidikan sehingga memudahkan pengguna dalam menemukan dan memanfaatkan layanan yang dibutuhkan.



BAB II

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

II.1 Visi BGTK Provinsi Nusa Tenggara Timur

Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai UPT Kemendikdasmen berkedudukan dibawah Ditjen GTKPG senantiasa mendukung tanggung jawab Kemendikdasmen dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan terutama dalam meningkatkan mutu pendidikan khususnya pengembangan dan pemerdayaan penddiika dan tenaga kependidikan, maka visi Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025-2029 adalah:

“Menjadi pusat keunggulan pengembangan profesional guru dan tenaga kependidikan di Nusa Tenggara Timur melalui ekosistem pembelajaran kolaboratif, inklusif dan berkelanjutan untuk mewujudkan pendidikan bermutu bagi semua”.

Visi tersebut mencerminkan komitmen lembaga untuk menjadi penggerak utama dalam peningkatan mutu pendidikan melalui kolaborasi dan penguatan kapasitas guru serta tenaga kependidikan. Seluruh upaya tersebut diarahkan untuk membangun ekosistem pendidikan yang berdaya saing dan berkarakter, yang pada akhirnya berkontribusi nyata.

II.2 Misi BGTK Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dalam rangka mewujudkan visi kelembagaan, Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan misi sebagai arah dan landasan strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. Melalui pelaksanaan misi ini, BGTK Nusa Tenggara Timur berupaya mewujudkan SDM pendidikan yang unggul dan berkarakter, mampu menjawab tantangan wilayah kepulauan, serta berperan aktif dalam mewujudkan pendidikan bermutu menuju Indonesia Emas 2045. Misi BGTK Provinsi Nusa Tenggara Timur, antara lain :

1. Meningkatkan kompetensi profesional guru dan tenaga kependidikan melalui pemetaan, pelatihan, pendampingan, dan pengembangan profesi berkelanjutan.
2. Mengembangkan inovasi pembelajaran dan media yang relevan, kontekstual, serta berbasis kebutuhan satuan pendidikan di NTT.

3. Memperkuat ekosistem pembelajaran yang kolaboratif, partisipatif, dan inklusif melalui kemitraan lintas pemangku kepentingan.
4. Memperluas pemerataan akses layanan peningkatan kompetensi GTK, terutama pada wilayah terpencil dan kepulauan.
5. Meningkatkan tata kelola kelembagaan, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik berbasis data dan bukti.

II.3 Tujuan BGTK Provinsi Nusa Tenggara Timur

Perumusan tujuan Balai ditujukan untuk menggambarkan ukuran terlaksananya visi-misi yang ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan dalam mendukung Dirjen GTK PG dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Adapun Tujuan dan Indikator Tujuan BGTK Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai berikut:

Tujuan	Indikator Tujuan
1. Meningkatkan kompetensi, inovasi, dan kepemimpinan pembelajaran pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah.	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran 2,63 persen
2. Meningkatkan sistem tata kelola kelembagaan yang akuntabel, transparan dan kolaboratif dalam layanan kelembagaan berbasis mutu	Nilai Kinerja Anggaran Balai GTK
	Provinsi Nusa Tenggara Timur minimal sangat baik Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai GTK Provinsi Nusa Tenggara Timur minimal A

II.4 Sasaran Strategis BGTK Provinsi Nusa Tenggara Timur

Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan dua sasaran strategis untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan yang akan dicapai tahun 2029, yaitu:

Tujuan	Sasaran Strategis
--------	-------------------

1. Meningkatkan kompetensi, inovasi, dan kepemimpinan pembelajaran pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah.	Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan
2. Meningkatkan sistem tata kelola kelembagaan yang akuntabel, transparan dan kolaboratif dalam layanan kelembagaan berbasis mutu	Meningkatnya tata kelola kelembagaan/ Balai GTK Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan Sasaran Strategis di atas, BGTK Provinsi Nusa Tenggara Timur mengidentifikasi indikasi risiko yang mungkin terjadi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Risiko-risiko tersebut dapat berindikasi pada ketercapaian Sasaran Strategis Kelembagaan. Adapun indikasi risikonya berdasarkan Sasaran Strategis sebagai berikut.

Sasaran Strategis	Indikasi Resiko
Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan	1. Tidak semua guru/tendik berpartisipasi aktif dalam program pengembangan karena faktor beban kerja, minat, atau kurangnya dukungan pimpinan sekolah maupun instansi ditingkat daerah ; 2. Jaringan internet dan sarana digital belum memadai untuk mendukung pelatihan daring atau hybrid 3. Guru belum terbiasa melakukan refleksi praktik dan inovasi pembelajaran setelah mengikuti pelatihan. 4. Perubahan struktur, kebijakan, atau regulasi pusat dapat memengaruhi arah program dan sasaran lembaga. 5. Jarak antar pulau dan keterbatasan transportasi memperlambat distribusi layanan pengembangan profesi. 6. Belum tersedia sistem Monev yang efektif untuk menilai dampak pelatihan terhadap peningkatan kompetensi guru 7. Ketersediaan anggaran yang belum mencukupi untuk menjangkau seluruh wilayah kepulauan dalam pelaksanaan program pelatihan, pendampingan, dan pengembangan profesi.

Meningkatnya tata kelola kelembagaan/ Balai GTK Provinsi Nusa Tenggara Timur	1. Perencanaan program belum sepenuhnya berbasis data kinerja dan evaluasi sebelumnya. 2. Proses administrasi dan layanan belum sepenuhnya terdigitalisasi. 3. Masih terdapat pola kerja sektoral dan belum terbangun budaya berbagi inovasi.
	4. Sebagian pegawai belum memiliki kompetensi manajerial, teknis, atau digital sesuai tuntutan tata kelola modern. 5. Kurangnya sinergi antar-Tim Kerja dalam pelaksanaan program serta pengelolaan data. 6. Kondisi kepulauan dan cuaca ekstrem dapat menghambat pelaksanaan koordinasi dan layanan ke daerah. 7. Program lembaga sangat bergantung pada arah kebijakan tahunan dari pusat



BAB III

Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

III.1

Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian

Arah kebijakan pada Rencana Strategis Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur mengacu pada arah kebijakan dan strategi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang diatur dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025-2029 yang memuat 8 (delapan) arah kebijakan dan strategis Kementerian, maka arah dan kebijakan strategi BGTK Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mendukung Arah Kebijakan dan Strategi Kemendikdasmen yakni : (1) Penguatan mutu layanan, dan kualitas pembelajaran dan pengajaran, kurikulum dan model pembelajaran, serta penilaian pendidikan, (2) Penguatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, dan (3) Penguatan tatakelola serta akuntabilitas Kementerian.

- (1) Penguatan mutu layanan, dan kualitas pembelajaran dan pengajaran, kurikulum dan model pembelajaran, serta penilaian pendidikan

Upaya peningkatan mutu pendidikan difokuskan pada penguatan pembelajaran yang mendorong penguasaan keterampilan hidup, soft skills, serta kompetensi dasar peserta didik melalui pendekatan yang bermakna, menyenangkan, dan berkesadaran. Pembelajaran dikembangkan berbasis STEM, coding, dan kecerdasan artifisial, dengan dukungan digitalisasi pembelajaran serta penyediaan bahan ajar berkualitas yang aman dan relevan. Kurikulum dan asesmen disempurnakan secara berkala melalui Asesmen Nasional dan Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan layanan pendidikan. Penguatan pendidikan karakter dilakukan secara menyeluruh melalui kolaborasi keluarga, sekolah, masyarakat, dan media, serta penerapan Profil Pelajar Pancasila untuk membentuk peserta didik yang berakhlak, cerdas, dan berbudaya. Selain itu, pengembangan minat, bakat, dan talenta diarahkan agar peserta didik menjadi kreatif, inovatif, dan mandiri dalam bidang sains, teknologi, seni, dan olahraga, melalui pemetaan, pembinaan, serta fasilitasi pengembangan karier dan prestasi. Mutu pendidikan diperkuat melalui penjaminan mutu, akreditasi, dan

penerapan Standar Nasional Pendidikan, serta keterlibatan relawan pendidikan sebagai mitra strategis sekolah. Program UKS dan Makan Bergizi Gratis (MBG) dioptimalkan untuk membangun budaya hidup sehat, disiplin, dan bertanggung jawab di lingkungan sekolah. Penguatan literasi dan penyediaan bahan bacaan bermutu, serta dukungan terhadap penerapan kurikulum sekolah rakyat, menjadi bagian dari upaya mewujudkan pendidikan yang merata, berkualitas, dan berkarakter di seluruh satuan pendidikan.

(2) Penguatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

Peningkatan kualitas tata kelola guru dan tenaga kependidikan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan, pemerataan distribusi, penataan karier, serta penilaian kinerja dan kompetensi secara periodik untuk menjamin standar mutu. Pengembangan profesional dilakukan melalui penguatan kurikulum pembelajaran guru yang menekankan literasi, numerasi, sains, teknologi, koding, kecerdasan artifisial, pendidikan karakter, dan kesehatan sekolah. Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan pemenuhan kualifikasi akademik minimal S1/D-IV terus ditingkatkan, disertai pengembangan kompetensi berbasis HOTS dan pelatihan dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Selain itu, peningkatan kepemimpinan sekolah dan kesejahteraan guru menjadi prioritas untuk mendorong perbaikan mutu pendidikan secara menyeluruh. Dukungan juga diberikan bagi program sekolah rakyat serta penerapan pembelajaran kelas rangkap di daerah dengan keterbatasan sumber daya, guna memastikan keberlangsungan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.

(3) Penguatan tatakelola serta akuntabilitas Kementerian.

Peningkatan tata kelola dilakukan melalui penerapan pelayanan yang RAMAH ((Responsif, Adaptif, Melayani, Akuntabel, dan Harmonis) dan SANTUN (Setia, Amanah, Negarawan, Teladan, Unggul, dan Ngemong), penguatan sistem akuntabilitas kinerja pendidikan yang transparan di semua tingkat, serta reformasi struktural kelembagaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja unit kerja.

III.2

Arah Kebijakan dan Strategi Balai

Arah kebijakan dan strategi Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai berikut:

1. Arah kebijakan : Penguatan kualitas ekosistem belajar guru dan pendidik lainnya yang berdaya, aktif, inklusif, berkelanjutan dan inovatif yang berbudaya di tingkat daerah yang melekat dan semangat belajar yang kuat bagi seluruh ekosistemnya. Hasil atau kondisi yang diharapkan antara lain :

- (a) Guru dan tenaga kependidikan yang menerapkan pembelajaran paradigma baru
- (b) Guru yang menerapkan Pendidikan Kepemimpinan Sekolah Model Baru
- (c) Guru dan Tenaga Kependidikan yang mampu mengembangkan dan menerapkan Inovasi Pembelajaran dalam peningkatan kompetensi

Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mencapai kondisi tersebut adalah :

- (1) Fasilitasi dan Pembinaan Guru dan tenaga kependidikan dalam penerapan pembelajaran paradigma baru. Komponen kegiatan balai yang mendukung yakni koordinasi dan Sosialisasi Pendampingan Pembelajaran serta Pelaksanaan pendampingan pembelajaran.
 - (2) Pengembangan Pelatihan Bidang Pendidikan Guru yang dalam Pendidikan Kepemimpinan Sekolah Model Baru. Komponen kegiatan yang mendukung yakni Koordinasi dan Sosialisasi Peningkatan Kompetensi Guru, Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Guru serta Supervisi dan Evaluasi Peningkatan Kompetensi Guru
 - (3) Pengembangan Pelatihan Bidang Pendidikan bagi pengembangan inovasi pembelajaran Guru dan Tenaga kependidikan dalam peningkatan kompetensi. Komponen kegiatan yang mendukung antara lain Penyusunan Pedoman dan Bahan, Koordinasi dan Sosialisasi Peningkatan Kompetensi Guru, Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Guru, Supervisi dan Evaluasi Peningkatan Kompetensi Guru Evaluasi Model-Model (Inovasi) Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
2. Arah Kebijakan : Penguatan sistem tata kelola kelembagaan yang handal, transparan dan akuntabel. Kondisi yang diharapkan dalam penguatan sistem tata kelola kelembagaan yang handal, transparan dan akuntabel yakni : (1) Predikat Akuntabilitas Kinerja Balai meningkat (2) Nilai capaian kinerja anggaran atas pelaksanaan RKAL meningkat.
- (1) Strategi yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan predikat akuntabilitas kinerja balai adalah :
- a. Memperkuat mekanisme perencanaan dan penganggaran yang berbasis pada kebutuhan;
 - b. Penguatan sistem pengawasan internal untuk meningkatkan kepatuhan dan integritas kelembagaan ;
 - c. Mengembangkan sistem manajemen terpadu dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja pengembangan program/kegiatan balai
 - d. Meningkatkan kapasitas dan pengelolaan SDM aparatur balai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya
 - e. Mengembangkan data dan informasi kelembagaan yang dapat diakses oleh publik
- (2) Strategi yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan nilai capaian anggaran pelaksanaan RKAKL balai adalah :

- a. Memperkuat mekanisme pengelolaan anggaran.
- b. Melaksanakan integralisasi sistem pelaporan keuangan yang transparan dan bertanggungjawab
- c. Melaksanakan penataan dalam pengelolaan Barang Milik Negara
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian anggaran serta pengawasan penggunaan anggaran kegiatan balai

Komponen kegiatan yang mendukung antara lain: Layanan Umum, Layanan BMN, Layanan Perkantoran, dan Layanan Sarana Internal

III.3

Kerangka Regulasi

Dalam rangka pelaksanaan di bidang pengembangan dan pemberdayaan guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah sesuai tugas dan fungsi yang diemban, maka sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah maka Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Timur membutuhkan adanya dukungan regulasi sebagai dasar legalitas balai guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dimaksud. Regulasi yang penting dan terkait dengan Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka memperkuat :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- f. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
- h. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah’
- i. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
- j. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan;

III.4

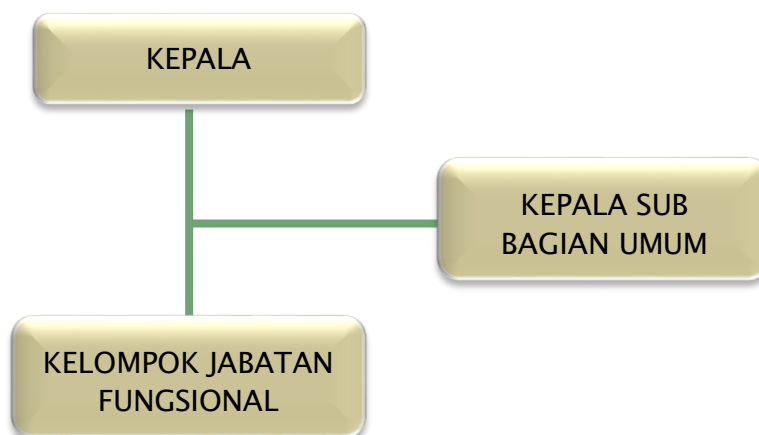
Kerangka Kelembagaan

1. Struktur Organisasi

Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disingkat BGTK Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah unit pelaksana teknis setingkat eselon III.a di bidang pengembangan dan pemberdayaan guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan. BGTK Provinsi Nusa Tenggara Timur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru dengan susunan organisasi terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Umum;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dengan mengacu pada susunan organisas dan ketentuan pada lampiran II Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Bidang Guru dan Tenaga Kepndidikan maka struktur Organisasi BGTK Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3.1 Struktur Organisasi BGTK Provinsi Nusa Tenggara Timur

- (1) Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan merupakan jabatan administrator atau setara dengan jabatan struktural Eselon III.a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Subbagian Umum merupakan jabatan pengawas atau setara dengan jabatan struktural Eselon IV.a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana ditetapkan pada UPT Bidang GTK sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil analisis jabatan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tugas memberikan pelayanan

fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

2. Tugas dan Fungsi Balai

Tugas dan fungsi BGP Provinsi Nusa Tenggara Timur didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan , antara lain :

a. Tugas

Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan.

b. Fungsi

- (a) Pelaksanaan pemetaan kompetensi guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
- (b) Pengembangan model peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
- (c) Pengembangan media pembelajaran guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
- (d) Pelaksanaan peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
- (e) Pelaksanaan fasilitasi peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
- (f) Pelaksanaan supervisi peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
- (g) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengembangan dan pemberdayaan guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
- (h) Pelaksanaan kemitraan di bidang pengembangan dan pemberdayaan guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
- (i) Pelaksanaan urusan administrasi

3. Pengelolaan SDM

Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur didukung oleh 53 orang ASN (Aparatur Sipil Negara) yang terdiri dari 33 orang PNS dan 15 orang PPPK, 5 orang PPPK paruh waktu. Selanjutnya kondisi ASN pada Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

3.1. Jabatan Kedinasan

Jumlah sumber daya ASN pada BGP Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan jabatan kedinasan terdiri dari Jabatan Eselon/struktural sebanyak 2 orang, Jabatan Fungsional Umum sebanyak 15 orang dan jabatan fungsional tertentu sebanyak 16 orang ditambah dengan PPPK sebanyak 20 orang. Jumlah sumberdaya aparatur sesuai jabatan kedinasan yang ada pada BGTK Provinsi Nusa Tenggara Timur maka yang perlu ditambahkan adalah pada jabatan Fungsional dimana BGTK Provinsi Nusa Tenggara Timur sangat kekurangan atau terbatas jumlahnya.

3.2. Tingkat Pendidikan

Umumnya ASN BGTK Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagian besar berpendidikan S1 sebanyak 25 orang (44,64%), berpendidikan D3 sebanyak 5 orang (9,43%) dan SMA/Sederajat sebanyak 13 (24,53%). Berpendidikan S2 sebanyak 10 orang (19,64%) dan Diploma 3 sebanyak 5 orang (8,92%). Tabel di bawah ini menunjukkan kondisi ASN BGTK Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan jenjang pendidikan yang ditamatkan.

Tabel 3.1 Jumlah ASN BGTK Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut Jenjang Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)				Total (%)
		Pejabat Eselon	Pelaksana	Fungsional	PPNPN	
1	S3	-	-	-	-	-
2	S2	1	-	9	-	10 (19,64)
3	S1	1	19	5	-	25 (46,64)
4	Diploma	-	5	-	-	5 (9,43)
5	SMA/Sederajat	-	13	-	-	13 (24,53)
Jumlah		2	37	14	-	53 (100)

Sumber : Data Kepegawaian Balai, 2025

3.3 Golongan dan Kepangkatan

Golongan dan kepangkatan ASN pada BGTK Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari golongan/pangkat Pengatur II/c sebanyak 2 orang (3,77%), Pengatur Muda Tk. I, II/d sebanyak 2 orang (3,77%), Penata Muda, III/a sebanyak 5 orang (9,43%), Penata Muda Tk. I, III/b sebanyak 11 orang (20,75%), Penata, III/c sebanyak 6 orang (11,32%), Penata Tk. I, III/d sebanyak 5 orang (9,43%), Pembina, IV/a sebanyak 1 orang (1,89%), Pembina Tingkat I, IV/b sebanyak 1 orang (1,89%), dan untuk PPPK Golongan V sebanyak 5 orang (9,43%), Golongan VII sebanyak 1 orang (1,89%), Golongan IX sebanyak 9 orang (16,98%) dan yang

tidak ada golongan sebanyak 5 orang (9,43%). Data ASN BGTK Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan golongan dan kepangkatan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3.2 Jumlah ASN BGTK Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut Golongan dan Kepangkatan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah (Org)	Persentase (%)
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	-
2	Pembina Tingkat I (IV/b)	1	1,89
3	Pembina (IV/a)	1	1,89
4	Penata Tingkat I (III/d)	5	9,43
5	Penata (III/c)	6	11,32
6	Penata Muda Tingkat I (III/b)	11	20,75
7	Penata Muda (III/a)	5	9,43
8	Pengatur Tingkat I (II/d)	2	3,77
9	Pengatur (II/c)	2	3,77
10	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	2	3,77
11	Pengatur Muda (II/a)	-	-
12	Golongan V	5	9,43
13	Golongan VII	1	1,89
14	Golongan IX	9	16,98
15	Tidak ada golongan	5	9
Jumlah		53	100

Sumber : Data Kepegawaian Balai , 2025

1. Fasilitas Balai

BGTK Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan, disamping dukungan sumber daya manusia (aparatur) sangat dibutuhkan pula ketersediaan fasilitas berupa sarana dan prasarana bagi pelayanan, penyelenggaraan dan pengembangan program, baik yang berupa lahan, gedung maupun sarana pendukung lainnya.

4.1. Tanah dan Gedung/Bangunan

Luas tanah yang dimiliki oleh BGP Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 18.000 M² dengan status milik sendiri dan merupakan hibah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan telah bersertifikat.

Tabel 3.3. Luas dan Status Tanah Milik BGP Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Uraian	Keterangan
1	Luas Tanah	18.000 M ²
2	Status Tanah	Milik Sendiri/Hibah Pemda Nusa Tenggara Timur
3	Status Kepemilikan	Sudah Bersertifikat

Sumber : Data BMN Balai, 2025

Luas Bangunan yang saat ini secara keseluruhan 6.357 M² dengan rincian Jenis bangunan dan kondisinya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3.4. Daftar Bangunan Gedung Milik BGTK Provnsi Nusa Tenggara Timur

No	Nama Barang	Kondisi	Luas Tanah Seluruhnya	Luas Bangunan
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Rusak Ringan	1523	1523
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	144	144
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	320	320
4	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Baik	180	180
5	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Baik	30	30
6	Bangunan Bengkel/Hanggar Permanen	Baik	224	224
7	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	Baik	80	80
8	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Baik	320	320
9	Gedung Pos Jaga Permanen	Rusak Ringan	18	18
10	Selasar	Baik	135	135
11	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	240	240
12	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	280	280
13	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	180	180
14	Bangunan Parkir Tertutup Permanen	Baik	120	120
15	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Baik	300	300
16	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Baik	15	15
17	Asrama Permanen	Baik	128	128
18	Asrama Permanen	Baik	192	192
19	Asrama Permanen	Baik	280	280
20	Asrama Permanen	Baik	80	80
21	Asrama Permanen	Baik	36	36
22	Asrama Permanen	Baik	72	72
23	Asrama Permanen	Baik	160	160
24	Asrama Permanen	Baik	60	60
25	Asrama Permanen	Baik	54	54
26	Asrama Permanen	Baik	36	36
27	Pagar Permanen	Baik	1000	1000
28	Pagar Permanen	Baik	150	150

Sumber : Data SIMAN, 2025

4.2. Kendaraan Bermotor

Dukungan yang tidak kalah pentingnya dalam pelaksanaan tugas-tugas balai adalah keberadaan kendaraan operasional balai. Diakui atau tidak keberadaan kendaraan bermotor sangat menunjang keberhasilan kegiatan balai. Dengan ketersediaan kendaraan bermotor baik kendaraan roda 4 maupun roda 2 telah meningkatkan mobilitas para ASN pada balai. Berikut adalah data kendaraan bermotor yang dimiliki oleh BGTK Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tabel 3.5 Daftar Kendaraan Dinas Operasional BGTK Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Nama Barang	Merk	Kondisi	Tanggal Perolehan
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota Inova 2.0 V M/T Bensin	Baik	2017-09-28
2	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota Rush Sportivo 2020	Baik	2020-10-08
3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	TOYOTA	Baik	2018-08-31
4	Sepeda Motor	Honda Beat CBS ISS 2017	Baik	2017-11-24
5	Sepeda Motor	Honda Beat CBS ISS 2017	Baik	2017-11-24
6	Sepeda Motor	Honda Beat CBS ISS 2017	Baik	2017-11-24
7	Sepeda Motor	Honda Beat CBS ISS 2017	Baik	2017-11-24
8	Sepeda Motor	Honda Beat CBS ISS 2017	Baik	2017-11-24
9	Sepeda Motor	Honda Beat CBS ISS 2017	Baik	2017-11-24
10	Sepeda Motor	KAWASAKI KLX150F	Baik	2018-12-14

Sumber : Data SIMAN, 2025

*Keterangan : * Dana APBN ** Hilang*

Fasilitas yang dimiliki balai tersebut tentu saja tidak dipakai begitu saja tetapi perlu diikuti dengan maintenance/perawatan dan atau perbaikan terhadap aset barang milik negara, sehingga tidak akan mengurangi nilai dan performa dalam hal kualitas pelayanan balai. Pengurangan kualitas pelayanan balai tentunya akan berdampak terhadap kualitas produk/output kinerja yang dihasilkan.

III.4

Reformasi Birokrasi

BGTK Provisni Nusa Tenggara Timur sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang berada di bawah Ditjen GTK PG sebagai salah satu unit utama, terus melanjutkan dan mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang meliputi delapan area perubahan, yakni :

8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi		
No	Area Perubahan	Implementasi Kegiatan
1	Manajemen Perubahan	Pengembangan dan Penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan (<i>reform</i>)
		Pembentukan tim kerja RBI di lingkungan BGTK Provinsi Nusa Tenggara Timur
		Penguatan nilai integritas, perubahan pola pikir dan budaya kinerja
		Pengembangan dan Penguatan peran agen perubahan dan <i>role model</i> dengan dibentuknya tim agen perubahan di lingkungan BGP Provinsi Nusa Tenggara Timur
2	Penguatan Pengawasan	Pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industri 4.0;
		Pembentukan tim SPI di lingkungan BGTK Provinsi Nusa Tenggara Timur
		Penyusunan rencana kerja SPI BGTK Provinsi Nusa Tenggara Timur
3	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Penguatan Sistem Manajemen resiko
		Pengembangan Perencanaan terintegrasi dalam balai (<i>collaborative</i>)
4	Penguatan Kelembagaan	Implementasi manajemen kinerja berorientasi hasil
		Penataan tugas dan fungsi Balai secara terpadu, terintegral dan berkelanjutan
5	Penguatan Tata Laksana	Implementasi dan penguatan Prosedur Operasional Standar (POS) dalam pelaksanaan tugas pegawai pada Balai
		Pemanfaatan IT dalam tata kelola balai
6	Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Implementasi Manajemen Kearsipan Modern dan Handal (dari manual ke digital)
		Perencanaan Analisa Jabatan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Jabatan dan Kompetensi
		Pengembangan Pegawai berbasis Kompetensi
		Assessment Pegawai

		Penanaman nilai integritas melalui penghargaan pegawai dengan kinerja terbaik
		Analisis Kebutuhan Pengembangan Pegawai
7	Penguatan/ Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Penguatan pemahaman dan pelaksanaan Peraturan pada semua jajaran balai
		Implementasi kebijakan Balai yang kongruen dengan aturan perundang-undangan
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyusunan dokumen standar pelayanan
		Penyusunan alur layanan public
		Mengembangkan budaya pelayanan prima
		Penguatan kompetensi petugas pelayanan publik
		Penilaian terhadap pelayanan melalui survey dan analisis kepuasan pelanggan



BAB IV

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

IV.1 Target Kinerja

Renstra BGTK Provinsi Nusa Tenggara Timur akan menjadi acuan (*guidance*) pelaksanaan program dan kegiatan bagi pimpinan unit kerja dan sub bagian umum dilingkungan BGTK Provinsi Nusa Tenggara Timur, agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya semakin akuntabel (*accountable*). Renstra BGTK Provinsi Nusa Tenggara Timur 2025-2029 merupakan bagian dari konsistensi penerapan penganggaran berbasis Kinerja. Target kinerja menunjuk pada tingkat pencapaian Sasaran Kegiatan (SK) berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang akan dicapai pada tingkat balai guna mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Program Dirjen GTK PG dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Kemendikdasmen dalam periode tahun 2025 - 2029.

BGTK Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun dan menetapkan target kinerja mengacu dan memperhatikan pencapaian angka kuantitatif dari setiap indikator kinerja kegiatan dan relevansinya secara logis dengan sasaran kegiatan yang ditetapkan Dirjen GTKPG yang didukung data yang jelas dan valid. Target kinerja dimaksud ditetapkan untuk setiap tahun selama kurun waktu lima tahun (2025-2029) Adapun target kinerja tahunan pencapaian dalam rencana strategis Balai periode 2025-2029 dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 4.1 Sasaran Kegiatan (SK), Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) , dan Target Tahunan 2025-2029

Sasaran/ Indikator	Sasaran Kegiatan (SK)	Satuan	Lini Dasar	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
SK 1	Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan							
IKK 1.1	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran	Persen	-	1,41	1,55	1,71	1,88	2.07
SK. 2	Meningkatnya Tata Kelola Balai GTK Provinsi Nusa Tenggara Timur							
IKK.2.1	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai GTK Provinsi Nusa Tenggara Timur	Predikat	-	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
IKK.2.2	Perdikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai GTK Provinsi Nusa Tenggara Timur	Predikat	-	A	A	A	A	A

Guna memudahkan dalam pengukuran target kinerja dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang ditentukan, maka telah dirumuskan definisi operasional terkait dengan pengukuran indikator kinerja kegiatan (Lampiran 1) Selama Tahun 2025-2029.

IV.2

Kerangka Pendanaan

BGTK Provinsi Nusa Tenggara Timur secara administratif dibawah dan bertanggungjawab kepada Ditjen GTKPG Kemendikdasmen, maka sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sistem anggaran dan pendanaan diatur dan ditetapkan melalui kontrak kerja yang dilaksanakan setiap tahun. Ketentuan dan pengaturan penganggaran merujuk dari ketentuan anggaran dan keuangan yang berlaku secara nasional. Secara indikatif pendanaan kelembagaan BGTK Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai target kinerja masing-masing indikator yang telah ditetapkan baik untuk indikator kinerja sasaran kegiatan (IKK) utama maupun penunjang maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan BGTK Provinsi Nusa Tenggara Timur, periode 2025-2029 dapat dilihat pada tabel Matrik Kinerja di bawah ini

Tabel 4.2 Matriks Kinerja dan Pendanaan BGTK Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2025-2029

(dalam ribuan)

Kode	Unit/Satker / Program / Kegiatan / Rincian Output	Satuan	T.A. 2025		T.A. 2026		T.A. 2027		T.A. 2028		T.A. 2029	
			Vol	Alokasi	Vol	Alokasi	Vol	Alokasi	Vol	Alokasi	Vol	Alokasi
03	Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru											
693360	Balai GTK Provinsi Nusa Tenggara Timur			40,697,946		40,176,244,		34,327,054		34,327,054		34,327,054
138.03.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran			35,735,432		40,176,244,		29,719,801		29,719,801		29,719,801
7614	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan			35,735,432		40,176,244		29,719,801		9,372,265		9,372,265
7614.DC1	Pelatihan Bidang Pendidikan	Orang	570	10.080.914	686	10,669,035	720	9,372,265	850	9,372,265	1000	9,372,265
7614.DC1.003	Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran dalam peningkatan kompetensi	Orang	570	10.080.914	686	10,669,035	720	9,372,265	850	10,872,265	1000	12,380,265
7614.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Orang	475	4,543,720	492	5,846,311	510	9,372,265	720	9,872,265	850	10,317,290
7614.QDC.011	Guru dan tenaga kependidikan yang mendapat pendampingan pembelajaran	Orang	475	4,543,720	492	5,846,311	510	20,347,536	720	9,872,536	850	10,317,290
7614.SCI	Pelatihan Bidang Pendidikan		678	21.110.898	1965	23,660,898	2005	20,347,536	2150	20,347,536	2300	20,347,536
7614.SCI.010	Guru yang mengikuti Program Pendidikan Kepemimpinan Sekolah Model Baru	Orang	334	17.684.267	832	19,986,404	850	19,392,655	895	19,392,655	900	19,392,655
7614.SCI.011	Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti Inovasi Pembelajaran dalam peningkatan kompetensi	Orang	334	3.426,611	1133	13,624,971	1155	954,881	1.255	954,881	1.400	984,881
138.03.WA	Program Dukungan Manajemen			4.962.514		8,554,205		4,607,253		4,807,253		4,907,253
7619	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen GTK			4.962.514		8,554,205		4,607,253		4,807,253		4,907,253
7619.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan	5	4.962.514	3	5,843,515	3	4,607,253	3	4,697,253	3	4,707,253
7619.EBA.956	Layanan BMN	Layanan	3	20.000	1	7,900	1	10.000	1	15.000	1	20.000
7619.EBA.962	Layanan Umum	Layanan	1	627,000	1	137,314	1	160,084	1	160,084	1	160,084
7619.EBA.994	Layanan Perkantoran	Layanan	1	4.911.887	1	5,698,301	1	5,798,301	1	1,094,075	1	4,447,169
7619.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Unit	1	30.000.000	1	2,710,690	-1	3.000.000-	1	5.200.000	1	5.950.000
7619.EBB.971	Layanan Sarana Internal	Unit	-	-	1	2,710,690	1	3.000.000	1	5.200.000	1	5.950.000



BAB V

Penutup

Rencana Strategis (Renstra) BGTK Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 adalah panduan pelaksanaan tugas dan fungsi BGTK Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra ini memuat tujuan dan sasaran kegiatan dari pengembangan program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan beserta dengan arah kebijakan dan strategi untuk mencapai sasaran kegiatan yang ditargetkan guna mendukung Ditjen GTKPK dalam bidang pengembangan dan pemberdayaan guru, kepala sekolah, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan. Renstra ini menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran kegiatan, serta dilengkapi dengan indikator keberhasilannya guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan APBN pada BGP Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 atau selama kurun waktu lima tahun.

Pelaksanaan Renstra secara konsisten diharapkan berkontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran kinerja BGTK Provinsi Nusa Tenggara Timur guna menunjang pencapaian Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dasar dan Menengah maupun pada Ditjen GTKPG. Hal ini dimungkinkan karena program kegiatan dalam Renstra ini telah dilengkapi dengan target kinerja yang akan dipantau dan dievaluasi secara berkala pada pertengahan periode Renstra sebagai *midterm review*, maupun pada akhir renstra sebagai *impact assessment*. Hasil evaluasi menjadi pedoman untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dokumen Renstra ini diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh jajaran maupun para pemangku kepentingan terlebih khususnya pada jajaran BGTK Provinsi Nusa Tenggara Timur guna mendukung pencapaian kinerja bidang pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan agar hasilnya bisa dirasakan dan berdampak bagi dunia pendidikan dan masyarakat terlebih khusus di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

